

## Pelatihan Sertifikasi Halal sebagai Upaya Menunjang Ketahanan Ekonomi Kelompok Wanita Pesisir (KWP) Pantai Kukup Yogyakarta

Nur Aini<sup>1</sup>, Rohmat Dwi Yunianta<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hadis, Institut Ilmu Al Qur'an An Nur

Email: [nurainipati87@gmail.com](mailto:nurainipati87@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut Ilmu Al Qur'an An Nur

Email: [rohmatdyunianta@gmail.com](mailto:rohmatdyunianta@gmail.com)

**Submitted:** 26-06-2023

**Revised:** 11-09-2023

**Accepted:** 29-12-2023

### Abstract

*This article aims to describe the finding of community engagement of IIQ An Nur in the coastal women's group (KWP) Kukup Beach Yogyakarta in order to that they have economic resilience through halal certification training. Economic resilience for coastal communities has become a necessity, not just a wish. This is because the life of the coastal community depends on the economic life of the coastal potential and its development. For this reason, it is necessary to provide assistance to coastal communities in developing their environmental potential as well as training in packaging product and halal certification and subsequently they have products with high economic value. The method used in this community engagement is the PRA (participatory rural appraisal) method. The results of the community engagement show that through assistance with financial literacy, product packaging and halal certification, the amount of production and profits for the company can be increased and the marketing reach can be expanded. Apart from that, from the consumer side, there is a feeling of security and stability because the packaging for KWP Pantai Kukup Yogyakarta products looks more attractive and is halal certified.*

**Keywords:** economic resilience, the coastal women's group, halal certification training

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan hasil pengabdian kepada masyarakat dari tim Lembaga Pengabdian Masyarakat IIQ An Nur kepada kelompok wanita pesisir (KWP) Pantai Kukup Yogyakarta agar memiliki ketahanan dalam hal ekonomi melalui pelatihan sertifikasi halal. Ketahanan ekonomi bagi masyarakat pesisir sudah menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi sebatas keinginan. Hal tersebut dikarenakan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupan ekonomi pada potensi pesisir dan pengembangannya. Untuk itu, perlunya pendampingan pada masyarakat pesisir dalam mengembangkan potensi lingkungannya sekaligus pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal agar memiliki produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Adapun metode yang digunakan dalam pendampingan ini adalah metode PRA (participatory rural appraisal). Hasil pendampingan menunjukkan bahwa melalui pendampingan literasi keuangan, pengemasan produk, dan sertifikasi halal, dapat meningkatkan jumlah produksi serta profit bagi perusahaan serta memperluas jangkauan pemasaran. Selain itu, dari sisi konsumen, adanya rasa aman dan mantap karena kemasan produk KWP Pantai Kukup Yogyakarta terlihat lebih menarik dan sudah bersertifikasi halal.

**Kata kunci:** ketahanan ekonomi, wanita pesisir, pelatihan sertifikasi halal

### 1. PENDAHULUAN

Masyarakat pesisir pantai selatan di Yogyakarta dengan segala potensi

yang dimiliki belum dapat memaksimalkan potensinya untuk meraih ketahanan ekonomi. Sebagian

besar peran untuk melakukan kegiatan ekonomi di wilayah pesisir (dunia perikanan) lebih menonjol dilakukan oleh kaum laki-laki. Sedangkan peran wanita hanya berkutat pada berbagai masalah rumah tangga atau keterlibatan wanita dalam dunia perikanan Indonesia sering didorong oleh keterbatasan ekonomi keluarga. Dalam (Aryani, 2017; Abdullah, 2006; Faqih, 2012, Sukri & Ridin, 2001) menyatakan bahwa peran wanita dalam perekonomian keluarga jarang sekali disinggung dan diperhatikan. Kondisi demikian telah dianggap sebagai hal yang lumrah karena dalam budaya Indonesia, wanita telah dikonstruksikan secara sosial maupun budaya yang hanya berkutat pada berbagai urusan rumah tangga. Tidak hanya dalam hal budaya, sebagian kelompok juga menafsirkan bahwa sumber hukum agama Islam juga menjelaskan adanya perbedaan posisi dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki (Arafah, 2022). Di sisi lain, hasil penelitian Soleman et al (2022), menyimpulkan bahwa perempuan memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan perekonomian keluarga.

Kabupaten Gunungkidul memiliki luas wilayah 1.485,36 km<sup>2</sup> atau sekitar 46,63% dari total wilayah Provinsi DIY. Kegiatan penangkapan ikan di kabupaten ini didominasi oleh kegiatan penangkapan ikan yang tersebar di 5 kecamatan yang

memiliki wilayah pesisir, yaitu Panggang, Saptosari, Tepus, Rongkop, dan Tanjungsari. Daerah yang dikembangkan masyarakat untuk kegiatan perikanan tangkap meliputi Pantai Gesing di Kecamatan Panggang, Pantai Ngrenehan di Kecamatan Saptosari, pantai Wediombo dan Sadeng di Kecamatan Rongkop, serta Pantai Baron, Drini, Sundak, Krakal, dan Kukup di Kecamatan Tepus dan Tanjungsari (Dinas Perikanan dan Kelautan, 2006).

Berbagai macam penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan sertifikasi halal telah dilakukan sebelumnya, baik hanya pada tataran peningkatan pemahaman atas kehalalan dan ke-thayyib-an produk makanan (Marsiati et al, 2022; Nuzulia, 2023) maupun pendampingan pemerolehan sertifikasi halal di berbagai produk, di antaranya produksi emping jagung (Zuriati, 2021), pie susu (Widayat et al, 2020) dan olahan hasil pertanian, seperti cengkeh, kopi dan pisang (Anwar, 2018).

Melalui metode PRA (*participatory rural appraisal*) ditemukan permasalahan dan solusi untuk menghadapi kendala yang dihadapi Kelompok Wanita Pesisir (KWP) Pantai Kukup dalam menghadapi potensi perikanan dan pemasarannya. Beberapa hal yang berhasil diinventarisasi adalah

kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan organisasi, kurangnya insentif pengurus lembaga, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas masyarakat di pesisir dan sertifikasi Halal bagi anggota adalah faktor utama yang menyebabkan kinerja kelompok masyarakat pesisir belum optimal.

Permasalahan tentang kurangnya profesionalisme pengurus dapat diatasi melalui pelatihan tentang manajemen organisasi dan pembimbingan mengenai kepemimpinan. Insentif bagi pengelola dapat diatasi melalui kegiatan pelatihan dengan nilai ekonomis lebih tinggi agar masyarakat memiliki sumber pendapatan sekaligus melakukan fungsinya dalam pengawasan. Sertifikasi halal bagi anggota yang mempunyai usaha kuliner dapat diatasi melalui kegiatan pelatihan dengan kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

KWP Pantai Kukup merupakan gabungan dari kelompok Kuaras dan Suminar. Anggota KWP Pantai Kukup adalah ibu-ibu yang melakukan usaha di bidang penggorengan olahan perikanan yang mengikuti program pendampingan dari Tim Pengabdian Masyarakat IIQ An Nur Yogyakarta. Dari kelompok Kuaras terdapat 7 orang yang melakukan usaha tersebut. Adapun kelompok Suminar terdapat 23 orang yang melakukan

usaha tersebut, sehingga total yang melakukan usaha penggorengan hasil perikanan adalah 30 orang. Akan tetapi, setelah tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pengurus Kuaras dan Suminar, ditetapkan 25 orang saja yang menjadi peserta pelatihan. Dasar pertimbangan pemilihan peserta pelatihan tersebut di antaranya adalah aksesibilitas peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian pelatihan, kontinuitas dalam produksi, dan keaktifan dalam berorganisasi.

Berangkat dari permasalahan tersebut, tim Lembaga Pengabdian Masyarakat IIQ An Nur Yogyakarta tergerak untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir agar potensi yang dimiliki dapat dioptimalkan untuk menumbuhkan ketahanan ekonomi bagi peserta pelatihan program. Peserta program adalah anggota Kelompok Wanita masyarakat pesisir (isteri nelayan, dan karang taruna) selaku lembaga sosial di Pantai Kukup.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang dipergunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode pendekatan PRA (*participatory rural appraisal*) yang meliputi berbagai tahapan penting sebagai berikut: (1) identifikasi pihak-pihak yang terkait (*stakeholder analysis*) (2) identifikasi

dan akomodasi keinginan masyarakat (3) identifikasi kriteria yang masyarakat inginkan (4) indikasi indikator yang diperlukan dalam evaluasi (5) membuat kesepakatan terhadap metode yang digunakan bersama masyarakat (6) koleksi data bersama masyarakat (Sapanli *et al.*, 2006). Menurut Hikmat (2001) teknik-teknik PRA mencakup proses sebagai berikut:

**a. Pemetaan Masalah, Potensi, dan Sumber Sosial secara Partisipatif**

Pemetaan masalah, potensi, dan sumber-sumber sosial merupakan langkah awal bagi tim pelaksana dalam partisipasi membangun masyarakat pesisir. Pemetaan masalah meliputi pengambilan data sekunder untuk memperoleh informasi awal mengenai kondisi sosio-demografis, sosio-ekonomi, dan sosio-budaya masyarakat.

**b. Perencanaan Partisipatif**

Dalam perencanaan partisipatif ini, tim pelaksana tidak berperan sebagai perencana untuk masyarakat tetapi sebagai fasilitator dalam proses perencanaan yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Tahapan proses partisipatif sebagai berikut: (1) *Focus Group Discussion* (FGD) atau diskusi kelompok terarah untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya, yaitu membahas permasalahan yang dialami oleh masyarakat. (2) Analisis pola keputusan, untuk kesepakatan dalam pembentukan lembaga lokal yang

diharapkan mendapat dukungan pemerintah

**c. Manajemen Pelaksanaan Keputusan**

Implementasi pelaksanaan partisipatif dengan subjek masyarakat sebagai peran utama yang mengelola perencanaan mulai dari tahap identifikasi masalah dan kebutuhan, identifikasi potensi lokal, pendayagunaan sumber-sumber lokal, penyusunan dan pengusulan rencana hingga evaluasi dari mekanisme perencanaan. Dalam hal ini tim pelaksana bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi upaya peningkatan aksesibilitas terhadap sumber-sumber lokal yang dibutuhkan.

**d. Monitoring dan Evaluasi Partisipatif**

Dalam hal ini tim pelaksana berperan sebagai evaluator eksternal untuk melihat gambaran perkembangan lembaga tersebut melalui rancangan metode partisipatif, teknik dan prosedur, instrumen pengumpulan data, pengolahan data, pelaporan data, dan analisis data. Hal ini dapat dilihat dengan menggunakan indikator keberhasilan dari dua dimensi; (1) Aktualisasi diri, mencakup ekspresi diri tiap masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan internalisasi penilaian yang merupakan hasil ekspresi diri yang dihargai dan dijadikan pertimbangan keputusan lembaga tersebut. (2) Ko-

aktualisasi eksistensi, menunjukkan adanya aktualisasi bersama antarlembaga, masyarakat dan pemerintah yang berimplikasi pada eksistensi lembaga dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sumberdaya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 25 orang pelaku usaha bidang kuliner yang tergabung dalam KWP (Kelompok Wanita Pesisir) Pantai Kukup, Dusun Sumuran, Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Untuk menjamin produksi kuliner ibu-ibu KWP Pantai Kukup yang tersertifikasi halal, maka diperlukan langkah-langkah untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu:

- 1) Pembelian bahan dasar dan bahan pendukung dengan cara memilih bahan-bahan yang telah memiliki sertifikasi Halal. Bahan dasar yang digunakan Kelompok Wanita Pesisir (KWP) Pantai Kukup adalah rumput laut dan ikan yang diperoleh dari Kabupaten Gunung Kidul, DIY, tepung beras, telur, santan, penyedap rasa, garam, bawang putih, kunyit, ketumbar, daun jeruk, dan minyak goreng yang diperoleh dari toko kue/toko bahan makanan terdekat.
- 2) Penyimpanan dan penggudangan dilakukan dengan cara menyimpan bahan tersebut ke dalam almari tertutup sehingga

aman dari kontaminasi silang ataupun najis seperti terhindar dari tikus, kecoa, ataupun bahan lain. Produk yang disimpan dalam wadah tertutup tersebut adalah: keripik rumput laut, peyek udang rebon, peyek jingking, krispi kakap putih, krispi wader, udang goreng, cumi goreng, ikan goreng, dan undur-undur goreng.

- 3) Tahap produksi yaitu pada tahap ini, peserta pelatihan diberi pemahaman tentang cara memproduksi produk dari memilih bahan, memroses, hingga tahap matang. kesemuanya perlu dicermati tingkat kebersihannya dan dihindarkan dari kotoran atau hal-hal lain yang dapat mengurangi tingkat kebersihan dan kualitas bahan. Semua bahan harus dicuci bersih, kemudian dimasak dengan digoreng sampai benar-benar matang, dan pengemasan perlu diperhatikan agar masakan awet dan menarik.
- 4) Sertifikasi halal, yang mana pelatihan dan pendidikan tentang sertifikasi halal ini merujuk pada UU No. 33 tahun 2014 pasal 4 yang berbunyi "Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Produk yang dimaksud di antaranya adalah produk pangan, obat-obatan, kosmetika, dan produk lainnya. Adapun sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal

melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, alat pendukung, dan SJH (Sistem Jaminan Halal) memenuhi standar LPPOM MUI.

Untuk membekali KWP Pantai Kukup memperoleh sertifikat halal, tim PKM IIQ An Nur Yogyakarta telah

memberikan pelatihan dan pendidikan tentang sistem jaminan halal pada industri kuliner. Diklat tersebut terlaksana atas kerjasama dengan LPPOM MUI DIY sebagai narasumber, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Jumeri M. Wikarta, Ph.D. sebagaimana terdapat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1: LPPOM MUI menjadi narasumber sertifikasi halal

Dalam diklat tersebut disampaikan tata cara pemilihan bahan, pemrosesan bahan, pengemasan produk sampai dengan urutan proses pengajuan sertifikat halal MUI. Bahan utama produk perikanan pada dasarnya telah halal, akan tetapi yang perlu diwaspadai dalam olahan hasil perikanan, terutama gorengan (krispi/peyek), adalah minyak yang digunakan untuk menggoreng. Minyak goreng menjadi titik kritis proses sertifikasi halal pada produk yang dimasak dengan cara digoreng. Melalui diklat

tersebut semua anggota KWP Pantai Kukup mengetahui dan sadar bahwa minyak goreng curah termasuk bahan yang tidak mendukung terbitnya sertifikat halal. Selain itu, dalam diklat tersebut juga ditekankan bahwa bahan lain seperti: tepung terigu, tepung beras, penyedap masakan, dan bahan-bahan lain juga harus menggunakan merk yang telah tersertifikasi halal/terdapat logo halal MUI pada kemasan produknya.

Sebagai implikasinya, KWP Pantai Kukup telah berhasil

menyusun SJH untuk 9 produk olahan hasil perikanan pada 20 September 2019. Produk olahan hasil perikanan tersebut adalah: keripik rumput laut, peyek udang rebon, peyek jingking, krispi kakap putih, krispi wader, udang goreng, cumi goreng, ikan goreng, dan undur-undur goreng. Adapun SJH beserta form pengajuan sertifikasi halal telah diserahkan kepada LPPOM MUI DIY pada tanggal 27 September 2019.

Setelah SJH terkumpul, proses selanjutnya adalah menunggu jadwal audit LPPOM MUI ke rumah produksi KWP Pantai Kukup. Adapun jadwal audit terlaksana pada tanggal 10 November 2019. Adapun hasil dari audit yang telah dilakukan, dinyatakan bahwa produk olahan yang diproduksi oleh KWP Pantai Kukup layak mendapat sertifikat halal seperti yang terdapat dalam gambar 2 berikut:



Gambar 2: Penyerahan Sertifikat halal KuPi Krezz kepada KWP Pantai Kukup

### *Workshop Packaging Design*

Kemasan merupakan hal yang penting dari suatu produk. Kemasan tidak hanya berfungsi sebagai pembungkus saja, akan tetapi kemasan menjadi sarana *marketing* tersendiri. Desain kemasan yang menarik akan menambah daya tarik tersendiri pada calon pembeli. Sebelum pelatihan, kondisi kemasan produk KWP Pantai kukup dapat dibilang sangat tradisional. Kemasan hanya berupa plastik kemudian

distaples atau sekedar ditali untuk pengegelannya. Label merk yang digunakan oleh KWP pun juga kurang menarik karena hanya terdiri dari satu warna saja.

Oleh karena itu, tim PKM IIQ An-Nur Yogyakarta memberikan workshop tentang ragam kemasan pada produk perikanan pada tanggal 27 September 2019. Narasumber dalam workshop tersebut adalah Bapak Fakhruddin Al Rozi, S.Pi. Melalui workshop tersebut, para

anggota KWP Pantai Kukup paham macam-macam ragam kemasan dan sadar tentang arti pentingnya sebuah kemasan suatu produk. Hasil akhir workshop tersebut juga berhasil merumuskan desain kemasan yang terkini untuk produk KWP Pantai

Kukup. Dalam pendampingan tersebut, semua anggota berhasil membuat kesepakatan membranding produk KWP Pantai Kukup dengan nama *brand* "KuPi Krezz".



Gambar 3: Kemasan produk sebelum pelatihan



Gambar 4: Kemasan produk setelah pelatihan

##### 5) Pelatihan Manajemen Usaha

Pelatihan manajemen dimaksudkan agar usaha yang dilakukan oleh ibu-ibu KWP Pantai Kukup dapat lebih terarah, terencana,

dan terorganisir sehingga tujuan dari usaha yang dilakukan lebih mudah dicapai dapat lebih optimal. Adapun diklat pembukuan dimaksudkan supaya arus keluar kas



keuangan ibu-ibu KWP Pantai Kukup lebih rapi dan terorganisir dengan baik. Kegiatan diklat manajemen dan keuangan tersebut telah dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2019 di WM Sabar Menanti Pantai Kukup. Narasumber diklat tersebut adalah Puji Sholikhah, M.M., salah satu staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IIQ An-Nur Yogyakarta.

Dalam pelatihan manajemen dipaparkan mulai dari alasan

mengapa sebuah usaha harus ada manajemen yang baik sampai dengan fungsi dan tujuan manajemen. Selain itu juga dipaparkan kaitannya dengan manajemen produksi, manajemen sumber daya alam manusia, manajemen pemasaran, manajemen pengembangan, dan manajemen keuangan. Diklat berlangsung secara interaktif. Mayoritas peserta mengaku senang dan paham akan pentingnya manajemen dalam sebuah usaha.



Gambar 5: Narasumber pelatihan manajemen usaha bersama ibu-ibu KWP Pantai Kukup.

#### 4. PENUTUP

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendampingan Tim Pengabdian Masyarakat IIQ Annur menghasilkan beberapa poin penting, yaitu:

1) Pelatihan halal dalam jasa industri kuliner sangat bermanfaat bagi peserta karena

melalui pelatihan tersebut peserta mengetahui cara produksi makanan yang halal serta mengetahui beberapa titik kritis pemroduksian makanan halal.

2) Pelatihan penyusunan SJH sangat bermanfaat bagi peserta karena melalui pelatihan tersebut peserta berlatih mengorganisir kelompoknya sehingga terbentuk

tim halal yang nantinya akan bertanggungjawab saat ada audit dari LPPOM MUI DIY selaku lembaga yang berwenang mengeluarkan halal di wilayah DIY.

- 3) Pelatihan *packaging design* juga sangat bermanfaat bagi peserta karena melalui pelatihan tersebut terdapat perubahan kemasan yang digunakan ke arah yang lebih baik. Kemasan lebih aman, sehat, dan menarik.
- 4) Pelatihan manajemen usaha dan keuangan perusahaan juga bermanfaat bagi peserta karena melalui pelatihan tersebut peserta paham dan sadar akan pentingnya manajemen dan pengaturan keuangan supaya tujuan usaha tercapai dengan optimal.
- 5) Perubahan cara mengemas produk telah mengindikasikan adanya peningkatan dalam penjualan.
- 6) Pendampingan yang dilakukan berhasil membranding produk KWP Pantai Kukup dengan nama *brand* "KuPi Krezz".

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2006). *Sangkan Peran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Anwar, Moch. Khoirul., Hendry Cahyono, A' rasy Fahrullah, Ach. Yasin. (2018). *Peningkatan Keterampilan Produksi Halal Melalui Pelatihan Produksi Halal Di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 2, No. 3.
- Arafah, Sitti. (2022). *Perempuan dan Kontribusi Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Islam: Sebuah Praktik*. Jurnal Mimikri: Vol. 8, No. 1, 30-37
- Aryani, Beti. (2017). "Peran Perempuan dalam Membantu Ekonomi Keluarga di Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Faqih, M. (2012). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2006. *Laporan Statistik Perikanan tangkap di Propinsi DIY*. Yogyakarta. Tidak dipublikasikan.
- Hikmat. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Press; Bandung.
- Marsiati, Himmi, Anna P. Roswiem, Triayu Septiani, Dedy Suseno. (2022). *Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Halal Dan Thayyib*. Jurnal

- Pengabdian Masyarakat Multidisiplin. Vol. 6, No. 1, 30-37
- Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright. (2003). *Human Resource Management*. New York: The McGraw Hill Companies Inc.
- Nuzulia dan Roisatun Khasanah. (2023). *Urgensi Sertifikasi Halal Pada Etika Produksi*. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam. Vol. 24, No. 1, 59-177
- Sukri, S.S., dan Ridin Sofwan. (2001). *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sapanli, K., Aprianty, G. M.Irsyad, M. Firdaus, dan Budiansyah, B. (2006). *Penguatan Kelembagaan Lokal dengan Model Co-Management dalam Rangka Menuju Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang*.
- Soleman, Fathia., Sjamsuddin A.K. Antuli, Nur Shadiq Sandimula. *Peran Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga di Kelurahan Tuminting*. (2022). Spectrum: Journal of Gender and Children Studies. Vol. 2, No.2, 85-94
- Widayat, Sulardjaka, A.N. Al-Baarri, Rifa Nurjannan. (2020). *"Pendampingan Sertifikasi Halal pada UMKM HANUM FOOD (Halal Certification Support in UMKM HANUM FOOD"* Vol. 3, No. 1, 83-87
- Zuriani, Martina, Riani. (2021). *Pemberdayaan Pelaku Agroindustri Emping Jagung Di Gampong Cot Keumuneng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara*. Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar. Vol. 3, No. 1, 42-53
- Zurnali, Cut. (2004). "Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Terhadap Perilaku Produktif Karyawan pada Divisi Long Distance PT Telkom Indonesia Tbk" Bandung: Tesis Program Pascasarjana UNPAD [www.kemadang-tanjungsari.desa.id/first/artikel/57z](http://www.kemadang-tanjungsari.desa.id/first/artikel/57z), diakses pada tanggal 10 Oktober 2022, pukul 21:36 WIB.